

MODA PRODUKSI PELELANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM LEBAK LEBUNG

Zahri Nasution dan Sastrawidjaja

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260

Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159

Diterima 19 Oktober 2011 - Disetujui 29 November 2011

ABSTRAK

Perairan umum lebak lebung (PULL) merupakan habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya (*river flood plain*) yang membentuk satu kesatuan fungsi dan mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan. Di Sumatera Selatan (Sumsel), PULL merupakan kawasan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan ini paling banyak dan luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan. Akses usaha penangkapan ikan di PULL dilakukan dengan cara lelang yang telah berlangsung sejak lama. Makalah ini membahas moda produksi yang terbangun dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan PULL dan menganalisa terjadinya dominasi pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan. Dukungan fakta bahwa rasionalitas yang digunakan pemerintah hanya didasarkan kepada rasionalitas ekonomi dan belum didasarkan atas rasionalitas eko-sosial. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat nelayan (lebih rendah dari upah buruh harian). Sistem pengelolaan sumberdaya perikanan PULL melalui sistem pelelangan belum mendukung upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Kata kunci: moda produksi, pelelangan sumberdaya, perairan umum

PENDAHULUAN

Perairan umum *lebak lebung* (PULL) adalah perairan umum air tawar yang memiliki ciri yang spesifik yang berbeda dengan perairan umum air tawar lainnya. PULL merupakan habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya (*river flood plain*) membentuk satu kesatuan fungsi dan mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan (Welcomme, 1979). Di Sumatera Selatan (Sumsel), PULL merupakan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan ini paling banyak dan luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan. Sekitar 65% wilayah Kab. OKI berupa rawa, payau, lebak, dan sungai yang berpotensi besar sebagai produsen ikan air tawar. Akses usaha penangkapan ikan di PULL dilakukan dengan cara lelang yang telah berlangsung di Sumsel sejak lama (Arsyad, 1982).

Suatu hal penting yang menjadi pertimbangan pengaturan lelang *lebak lebung* ini adalah agar tidak terjadi konflik antara nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan, dan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nasution, 1990). Pengaturan pelelangan sumberdaya perikanan PULL di Kab. OKI telah menjadi sumber utama PAD. Disisi lain usaha penangkapan ikan di PULL merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat nelayan di wilayah ini. Dalam hal ini, kedua kepentingan tersebut berkompetisi terhadap upaya pelestarian sumberdaya perikanan PULL.

Little (2000) mengemukakan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, baik yang dapat pulih maupun yang tidak dapat pulih, jika masing-masing pihak mementingkan kepentingannya, makadapat dipastikan pendekatan rasionalisme ekonomi neo-klasikal yang akan berlangsung. Dalam hal demikian, setiap individu berpikir untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dirinya sendiri. Pemanfaatan sumberdaya PULL, pemerintah daerah dapat saja bertujuan memaksimalkan PAD tanpa memikirkan kelestarian sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Tujuan akhirnya inilah yang dimaksud Little (2000) sebagai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan sumberdaya semaksimal mungkin, yang dalam pelaksanaannya banyak mengakibatkan kerusakan dan permasalahan lingkungan.

Di lain pihak, Woodhouse (1972) mengemukakan bahwa refleksi dan proyeksi hubungan antara modernitas dan masalah lingkungan di tahun 1970-an yang menunjukkan kerisauan atas gelombang modernisasi-pembangunan terhadap kehancuran alam telah muncul sejak lama. Woodhouse, dalam analisis eko-politiknya, berpandangan bahwa "*international system demanded by the rich industrial nations has a critical influence over future internal development in the poor nations*". Woodhouse selanjutnya menyatakan bahwa politik pembangunan ala Barat bersendikan pada ciri-ciri (a) proses sekularisasi terhadap sistem nilai-budaya lokal, (b) penetrasi rasionalisme ekonomi industrial-kapitalistik, (c) kompleksitas organisasi teknologi, dan (d) proses modernisasi kehidupan, telah mendepleksi

(menyedot) sumberdaya alam secara berlebihan dan makin meningkatkan derajat resiko masyarakat terhadap bahaya lingkungan tercemar.

Dari pemikiran tersebut, menimbulkan gagasan "*rationality reform*" adalah reformasi rasionalisme yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan yang ada di bumi ini. Reformasi ini dikemukakan atas hasil pertemuan pemikiran Dryzek, Beck dan Gorz. Mereka berusaha memikirkan kembali sifat dasar rasionalitas yang tidak didasarkan pada rasionalitas ekonomi neo-klasik yang egois, sehingga lebih dapat memahami alam, sosial dan batasan serta cakupan yang tersedia untuk individu (Little, 2000). Dryzek mengisyaratkan bahwa rasionalitas lingkungan adalah cara yang paling tepat untuk memahami tantangan-tantangan dunia modern dan perlunya untuk memikirkan kembali ekonomi politik.

Namun dalam hal prosedur pengambilan keputusan yang diperlukan dalam proses ini, Gorz dan Dryzek berbeda pendapat. Gorz menyatakan bahwa ada beberapa area dimana rasionalitas ekonomi, sosial dan lingkungan akan saling berlawanan, dan ekonomi politik eko-sosial yang ada haruslah menunjukkan bagaimana ketiga rasionalitas tersebut bisa disatukan dalam batasan rasionalitas ekonomi, dan negara dalam hal ini menjadi penting sebagai pengatur (Little, 2000). Oleh karena itu, gagasan rasionalitas ekonomi yang dikemukakan oleh Dryzek, Beck, dan Gorz tidak semata-mata memaksimalkan keuntungan materi dan *utility*, tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas sosial dan lingkungan.

PERTANYAAN KRITIS

Menangkap ikan atau menjadi nelayan merupakan pekerjaan sebagian terbesar masyarakat Kabupaten OKI, yang sudah berlangsung sejak lama, sehingga menjadi pilihan hidup (*way of life*) mereka. Akses penangkapan ikan di perairan umum di Sumsel, khususnya pada lebak lebung dan sungainya¹ diatur melalui sistem pelelangan yang diadakan pada setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Meskipun tujuannya baik yaitu mengatur penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu, sistem pelelangan PULL mempunyai beberapa kelemahan antara lain diizinkan warga yang bukan nelayan ikut serta dalam pelelangan (Zain, 1982). Hal ini menyebabkan hak usaha penangkapan ikan pada sebagian besar perairan di Kabupaten OKI diperoleh pedagang (bukan nelayan) (Nasution *et al*, 1992; Sripo, 2002). Nelayan memperoleh hak penangkapan ikan dari pedagang tersebut. Pada kondisi demikian ternyata, walaupun nilai ikan hasil tangkapan nelayan cukup tinggi, namun pendapatan nelayan masih tetap saja rendah sebagai akibat tingginya nilai harga sewa perairan (Nasution dan Dharyati, 1999).

Oleh karena itu, sistem alokasi akses sumberdaya perikanan di PULL di Sumatera Selatan yang dijalankan melalui sistem pelelangan terbuka secara umum dan biaya perairan dan harus dibayar tunai pada awal tahun terlihat tidak berpihak kepada masyarakat nelayan, karena nelayan secara umum tidak mempunyai modal secara tunai (Nasution *et al*, 1995). Kondisi ini memunculkan pertanyaan "bagaimana moda produksi pelelangan sumberdaya perikanan terkait dengan pendapatan nelayan dan apakah pengelolaan sumberdaya perikanan dengan sistem pelelangan tersebut telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan".

MODA PRODUKSI DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Moda produksi atau pola hubungan atau interaksi sosial agraria yang terdapat dalam masyarakat sangat ditentukan oleh formasi sosial yang ada. Perbedaan dalam cara produksi yang eksis dan tipe cara produksi yang dominan akan mengakibatkan perbedaan dalam pola hubungan agraria yang berlaku. Beberapa tipe cara produksi yang mungkin eksis dalam suatu masyarakat, dengan salah satu diantaranya tampil dominan (Wiradi, 2000), sebagai berikut:

- (a) tipe naturalisme sumber agraria yaitu sumber agraria dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat, secara kolektif;
- (b) tipe feodalisme yaitu sumber agraria dikuasai oleh minoritas "tuan tanah" yang biasanya juga merupakan "patron politik";
- (c) tipe kapitalisme yaitu sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap yang merupakan perusahaan kapitalis;
- (d) tipe sosialisme yaitu sumber agraria dikuasai oleh Negara atas nama kelompok pekerja; dan
- (e) tipe populisme/*neo-populisme* yaitu sumber agraria dikuasai oleh keluarga /rumah tangga pengguna.

Lima tipe tersebut adalah tipe-tipe ideal yang tidak mungkin ditemukan secara mutual eksklusif dalam suatu masyarakat. Artinya tidak ada sesuatu masyarakat dengan struktur agraria yang murni naturalis, feodalis, kapitalis, sosialis, ataupun populis/neo-populis (Sitorus, 2004). Kondisi yang lebih realistis adalah dua atau lebih tipe struktur agraria sama-sama eksis dalam suatu masyarakat, tetapi dengan dominasi salah satu tipe atas tipe-tipe lainnya (yang menjadi marginal). Oleh karena itu, pada tipe struktur agraria, dominasi penguasaan sumber agraria itu pada satu pihak subyek memunculkan hubungan-hubungan sosial atau dengan kata lain struktur agraria yang berbeda antara satu dan lain masyarakat. Pada tipe kapitalis misalnya, hubungan non-penggarap dengan anggota-anggota komunitas menjadi hubungan

¹Lebak lebung dan sungainya adalah terjemahan dari river flood plain area yaitu satu kesatuan perairan umum yang memiliki perubahan tinggi air sesuai dengan musim penghujan dan kemarau (Welcomme, 1979).

“ketua-anggota”. Sementara pada tipe populis/neo-populis keluarga-keluarga penguasa/pemanfaat sumber agraria boleh dikatakan berdaulat. Keseluruhan hubungan agraria tersebut di atas, baik hubungan teknis (dimensi kerja) maupun hubungan sosial (dimensi interaksi/komunikasi), dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antar subyek yang berpusat pada objek agraria. Hubungan sosial tidak saja terjadi dalam pola inter-kelompok subyek: misalnya, antara individu, keluarga, dan kelompok dalam suatu komunitas; antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam kelompok pemerintah; antara perusahaan multinasional, nasional, dan lokasi dalam kelompok perusahaan.

Masalah riil terpenting yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan dalam struktur agraria yang berujung pada eskalasi konflik agraria terutama di wilayah pedesaan. Masalah riil yang terus disuarakan saat ini adalah perlunya reformasi agraria. Reformasi agraria dimaksudkan adalah penataan-ulang struktur agraria sehingga terbentuk suatu pola distribusi akses keagrariaan (hak-hak atas sumber agraris) dan pola-pola hubungan sosial keagrariaan antar dan intra kelompok subyek agraria (komunitas, perusahaan swasta dan pemerintah) secara berkeadilan dalam suatu rangka “transformasi agraria” (*agrarian transformation*). Terdapat sekurangnya empat prasyarat pokok yang harus dipenuhi untuk memungkinkan keberhasilan reforma agraria (Wiradi, 2000). Pertama, harus ada kemauan politik yang serius (sehingga menjadi komitmen) dari elit penguasa. Kedua, elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis. Ketiga, harus ada partisipasi aktif dari semua kelompok subyek agraria. Keempat, harus ada data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti. Pilihan metode kajian agraria berkaitan terutama dengan dua prasyarat tersebut terakhir, yaitu partisipasi semua kelompok subyek agraria dan data dasar masalah agraria.

Pertama, prasyarat “partisipasi semua kelompok subyek agraria” mengandaikan kajian agraria sebagai kajian integral dari reforma agraria. Karena itu, harus dipilih suatu metode kajian yang dapat melibatkan ketiga kelompok subyek (komunitas, perusahaan, pemerintah) dalam posisi yang setara. Pelibatan ini pada akhirnya akan berujung pada konsensus atau kesepakatan tentang reforma agraria. Kedua, prasyarat “data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti” menuntut suatu metode kajian yang tidak hanya berorientasi pada pengukuran luas masalah, tetapi lebih penting lagi, pendalaman dan pemahaman masalah keagrariaan secara rinci khususnya di aras lokal. “Aras lokal” secara khusus perlu mendapat penekanan mengingat suatu gerakan reforma agraria idealnya bersifat spesifik lokal, kendatipun tetap harus di bawah suatu payung kebijakan nasional (Sitorus, 2004). Untuk masa sekarang penekanan semacam ini mendapatkan relevansinya dalam praktek otonomi daerah.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN EKOLOGI POLITIK

Ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan yakni prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip berkelanjutan (Novita *et al.*, 2007). Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek utama pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup) dapat terpenuhi. Kemudian, ketiga aspek pembangunan tersebut hanya mungkin dicapai jika ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan.

Prinsip demokrasi bertujuan menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat merupakan prinsip moral paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan. Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk berharap bahwa pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan. Sementara prinsip keadilan yang pada dasarnya ingin menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Prinsip keberlanjutan pada dasarnya menuntut agenda pembangunan berdimensi visioner jangka panjang. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit. Prinsip keberlanjutan menuntut pemilihan alternatif yang lebih hemat terhadap sumber daya dan mampu menggabungkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan yang arif. Prinsip ini mengharuskan kita untuk menggunakan pola-pola pembangunan yang hemat energi, bahan baku dan sumberdaya alam. Prinsip keberlanjutan menunjang juga kepada prinsip keadilan antar-generasi. Prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan menuntut sikap hati-hati dan arif dalam setiap kebijakan pembangunan jangka pendek, sehingga tidak menimbulkan dan dibayar mahal dengan kerugian jangka panjang yang tidak sebanding dengan manfaat jangka pendek. Kerugian jangka panjang tidak hanya bersifat ekonomis-material-fisik, tetapi juga non material, mental, spiritual, kesehatan, sosial budaya dan nilai serta mutu kehidupan manusia.

Sumberdaya alam dan lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi, dimana tanpa adanya sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Karena itu, dalam sistem ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan harus diperlakukan sama seperti aset yang lain, seperti pekerja dan modal, sebagai aset

ekonomi dan apabila kinerja ekonomi ingin diperbaiki, maka perlu mempertahankan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan menginginkan sumberdaya alam dan lingkungan tidak mengalami kerusakan.

Dalam misi yang sama, yaitu pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan manusia, ide-ide kapitalisme telah menjadi sumber utama yang menyebabkan terjadinya degradasi bahkan kehancuran ekosistem. Hal ini sangat terkait dengan cara kerja sistem kapitalisme yang selalu memaksimalkan keuntungan atas produktivitas melalui eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya manusia (tenaga kerja) dan sumber daya alam. Oleh karena itu Marxisme ekologis memberi respon yang sangat radikal terhadap praktek-praktek kapitalisme yang telah menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup masyarakat manusia dan alam. Proses produksi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas yang mencakup produksi, konsumsi, dan sirkulasi antara alam (ekologi), sosial, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga tidak semata-mata antroposentris.

Guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada tiga dimensi, yakni keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan yang adil dan merata (*social progress*), dan keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*), maka strategi pembangunan harus memenuhi syarat yaitu: 1) sistem politik yang menjamin secara efektif partisipasi warga dalam pengambilan keputusan; 2) sistem ekonomi dan inovasi teknologi yang mampu menghasilkan surplus berkesinambungan; 3) sistem yang menyediakan cara pemecahan secara efektif permasalahan yang timbul karena ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan; dan 4) sistem internasional dengan pola berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan serta perdagangan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan kelautan dan perikanan pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan atau suatu proses yang disengaja untuk mengarahkan sub-sektor perikanan menuju lebih maju jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dengan mempertimbangkan daya pulihnya. Ada lima persyaratan dalam terlaksananya pembangunan perikanan berkelanjutan (Dahuri *et al*, 2000), yaitu:

Pertama, perlunya keharmonisan ruang (*spatial harmony*) untuk kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam peta tata ruang.

Kedua adalah tingkat pemanfaatan sumberdaya dapat pulih (seperti sumberdaya kelautan dan perikanan atau hutan mangrove) yang tidak boleh melebihi kemampuan pulih (*renewable capacity*) dari sumberdaya tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dalam terminologi pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya perikanan tangkap, kemampuan pulih yang dimaksudkan dikenal dengan istilah hasil tangkapan maksimum yang lestari (*Maximum Sustainable Yield, MSY*). Nilai MSY ini diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah populasi ikan yang terdapat pada suatu wilayah atau ekosistem dibagi dengan jumlah upaya (baik dalam bentuk jumlah alat tangkap atau jumlah kapal yang digunakan untuk melaksanakan penangkapan ikan) di wilayah tersebut.

Ketiga, adalah eksploitasi sumberdaya kelautan misalnya bahan tambang dan mineral (sumberdaya tidak dapat pulih) harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan agar tidak mematikan kelayakan usaha (*viability*) sektor pembangunan (ekonomi) lainnya.

Keempat, membuang limbah ke suatu lingkungan ekosistem harus disesuaikan dengan kapasitas asimilasi lingkungannya baik berupa limbah organik maupun unsur hara yang sifatnya dapat teruraikan oleh alam (*biodegradable*).

Kelima, dalam merancang dan membangun kawasan yang terkait dengan sumberdaya kelautan dan perikanan, misalnya wilayah pesisir dan laut harus sesuai dengan kaidah-kaidah alam atau kaidah yang tidak merusak secara ekologis (*design and construction with nature*).

DOMINASI MODA PRODUKSI PELELANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum lebak lebug (PULL), pemerintah daerah sebagai pemegang kuasa lisensi terlihat lebih berfungsi sebagai "majikan" terhadap nelayan yang hanya berfungsi sebagai "buruh". Oleh karena itu, moda produksi seperti ini akan dibahas menggunakan pendekatan Marxian dengan konsepnya yang mengemukakan bahwa parameter kesatuan tersusun oleh kekuatan saling bertentangan dan saling menegasikan, sebagaimana dikemukakan oleh Dharmawan (2007). Hal ini antara lain dapat dilihat banyaknya warga yang bukan nelayan yang memenangkan pelelangan perairan, padahal akses tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan (Tabel 1).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa sebagian besar (79%) hak akses penangkapan ikan yang menjadi objek pelelangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dimenangkan (didapatkan) oleh bukan nelayan (pedagang), padahal perairan di sepanjang Sungai Lempuing tersebut adalah tempat usaha penangkapan ikan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten OKI, terutama nelayan yang bermukim di wilayah Kecamatan Pedamaran. Akibatnya, masyarakat nelayan hanya mendapatkan akses penangkapan ikan dari pemenang lelang tersebut (pedagang) dengan harga yang tinggi (Tabel 2).

Tabel 1. Perbandingan antara nelayan dan bukan nelayan dalam memenangkan pelelangan akses penangkapan ikan di perairan Sungai Lempuing.

Kategori Bagian Perairan	Pemenang Lelang			
	Nelayan	%	Bukan Nelayan	%
Bagaian Hilir	7	21	14	43
Bagian Tengah	0	0	6	18
Bagian Hulu	0	0	6	18
Jumlah	7	21	26	79

Sumber: Nasution dan Dharyati (1999).

Tabel 2. Perbandingan antara harga perairan pada saat lelang dan harga pada tingkat nelayan pengelola perairan di Sungai Lempuing

Nama Perairan di Sungai lempuing	Tingkat harga perairan (Rupiah)	
	Pada Lelang	Pada Nelayan
Iilir Dusun Pedamaran	1.368.500	2.700.000
Lebak Petai Besar	3.565.000	4.250.000
Perairan Lebak Cengal	885.500	885.500
Batang Hari Dedap	1.150.500	1.150.500
Perairan Belanti	7.130.000	9.000.000
Sarang Lang Pakuaji	7.476.150	14.750.000
Perairan Lubuk kemudi	7.843.000	13.500.000
Rata-rata	4.202.593	6.605.072

Tabel 2 memberikan gambaran bahwa rata-rata tingkat harga beberapa perairan di Sungai Lempuing yang ditetapkan pemerintah daerah melalui panitia pelaksana pelelangan perairan adalah sebesar Rp.4.202.593, sedangkan tingkat harga yang harus dibayar nelayan sebagai pengelola penangkapan ikan diperairan tersebut rata-rata sebesar Rp. 6.605.072,- Selisih antara kedua tingkat harga tersebut sebesar Rp.2.402.479,- adalah merupakan biaya yang harus dibayar masyarakat nelayan sebagai akibat ketidakmampuan mereka membayar tunai pada saat pelelangan.

Sumber modal yang digunakan nelayan dalam mendapatkan akses usaha penangkapan ikan di beberapa perairan yang dilelangkan pemerintah di Sungai Lempuing diperlihatkan pada Tabel 3. Tabel 3 memperlihatkan bahwa sumber keuangan nelayan guna mendapatkan akses untuk melaksanakan penangkapan ikan di perairan yang dilelangkan pemerintah semuanya berasal dari pedagang. Hanya pada dua perairan, nelayan memerlukan pedagang hanya untuk membantu keuangan keluarga dan pinjaman dari teman (perairan Cengal dan Dedap).

Kebanyakan nelayan menggantungkan sumber keuangan pada pedagang karena fasilitas pinjaman dari bank tidak ada sama sekali. Tidak

adanya nelayan yang berhubungan dengan bank antara lain menurut mereka sejauh ini belum adanya lembaga perkreditan (bank) baik swasta maupun pemerintah yang menyediakan kredit khusus bagi usaha nelayan untuk modal dalam mengikuti pelelangan perairan (Nasution dan Dharyati, 1999).

Khusus pinjaman dari pedagang mekanisme yang dilakukan melalui perjanjian terhadap hasil tangkapan, jaminan dan persyaratan perjanjian lainnya yang pada prinsipnya memberatkan nelayan. Adapun isi perjanjian antara nelayan dan pedagang dalam pembelian perairan antara lain, nelayan dianggap meminjam uang sebesar harga perairan yang telah ditambah "bunga uang". Transaksi itupun disertai dengan jaminan yang biasanya berupa rumah atau tanah perumahan atau tanah kebun atau sawah. Jika tidak terlunasi dalam waktu satu tahun usaha penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh nelayan, maka rumah dan tanah atau jaminan lainnya yang dijamin nelayan menjadi milik pedagang yang diperhitungkan di akhir tahun. Nelayan terpaksa menjalani transaksi demikian dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan lain, selain menjadi nelayan dan bahkan menangkap ikan merupakan "way of life" bagi masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah Kecamatan Pedamaran umumnya.

Tabel 3. Sumber modal yang digunakan nelayan dalam mendapatkan akses usaha penangkapan ikan di sepanjang Sungai Lempuing.

Nama Perairan	Sumber Uang Pembayaran Sewa Perairan			
	Pedagang	Keluarga	Teman	Bank
Perairan Lebak Pedamaran	V	-	-	-
Perairan Lebak Danau	V	-	-	-
Perairan Cengal	V	V	V	-
Batang Hari Dedap	V	V	V	-
Perairan Lebak Lampam	V	-	-	-
Perairan Laut Sekampung	V	-	-	-
Perairan Sungai Aur	V	-	-	-
Perairan S. Lang Pakuaji	V	-	-	-
Perairan Lubuk Kemudi	V	-	-	-
Perairan Sipin	V	-	-	-
Perairan Danau Tigo	V	-	-	-
Perairan Tanjung Sari	V	-	-	-
Jumlah	12	2	2	0

Sumber: Nasution dan Dharyati (1999).

Keterangan : v = Berhubungan - = Tidak berhubungan

Dengan bertambahnya biaya pembelian perairan, maka nelayan akan berusaha mengembalikannya pada masa satu tahun sekalipun dengan cara menangkap seluruh jenis dan ukuran ikan. Dengan demikian sewa perairan yang meningkat tersebut dibebankan terhadap populasi ikan yang ada pada perairan tersebut. Ini merupakan suatu dampak lelang perairan yang secara tidak langsung menurunkan tingkat pendapatan nelayan sekaligus menurunkan produksi ikan dari perairan yang dilelangkan tersebut. Dengan demikian, kondisi yang ada adalah kemiskinan nelayan (tinjauan dari aspek sosial pembangunan berkelanjutan) dan terkurasnya sumberdaya perikanan perairan umum lebak lebung (dari aspek ekologi pembangunan berkelanjutan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Moda produksi yang terbangun dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan PULL adalah terjadinya dominasi pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan, dengan dukungan fakta bahwa rasionalitas yang digunakan pemerintah hanya didasarkan kepada rasionalitas ekonomi (belum didasarkan atas rasionalitas eko-sosial). Hal ini tercermin dari orientasi bahwa sumberdaya perikanan merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat nelayan (lebih rendah dari upah buruh harian). Sistem pengelolaan sumberdaya perikanan PULL melalui sistem pelelangan belum mendukung upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemanfaatan yang ada belum mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial disamping aspek ekonomi, sehingga mengabaikan prinsip pembangunan perikanan

berkelanjutan. Hal ini terlihat dengan adanya kondisi menurunnya kuantitas (produksi dan produktivitas hasil tangkapan per satuan waktu) dan kualitas sumberdaya perikanan (mengecilnya ukuran individu ikan) di perairan umum lebak lebung yang dilelangkan. Oleh karena itu, perlu perubahan Perda dan atau peraturan yang terkait dengan "lelang lebak lebung" di wilayah Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan.

Persamaan status (emansipasi status) antara pemerintah daerah dan masyarakat nelayan merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal ini, ide utama aksi kolektif masyarakat nelayan pada prinsipnya mengemukakan bahwa akses usaha penangkapan ikan seharusnya menjadi hak utama masyarakat nelayan. Untuk itu, penguatan kelembagaan masyarakat nelayan merupakan suatu upaya agar nelayan dapat memperkuat kelompoknya. Termasuk dalam advokasi ini juga misalnya upaya yang memperjuangkan ketersediaan kredit modal kerja bagi masyarakat nelayan PULL, sebagaimana layaknya didapatkan nelayan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia, agar mampu membayar tunai akses sumberdaya perikanan di saat pelelangan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M.N. 1982. Peranan Hukum Adat dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Sumatera Selatan. Pros. Puslitbangkan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta. Hal.11-16.

- Dahuri, R. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia. LISPI. Jakarta.
- Dharmawan, A. H. 2007. *Bagaimana Cara Mengisi "Ruh" pada Tesis dan Disertasi Sosiologi Pedesaan*. IPB. Bogor (belum dipublikasi).
- Little, A. 2000. Environmental and eco-social rationality: *Challenges for political economy in late modernity*. *New Political Economy*; 5(1), p: 121-133.
- Nasution, Z. 1990. Lelang lebak lebug atur nelayan. *Harian Pagi Sriwijaya Post*. Palembang.
- Nasution, Z.; A.D. Utomo dan D. Prasetyo. 1992. *Sosial ekonomi dan pemasaran ikan perairan umum lebak lebug di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*. *Pros. Perairan Umum*. Puslitbang Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Nasution, Z. et. al. 1995. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Melalui Lelang Lebak Lebug di Sumatera Selatan*. Laporan Penelitian Kerjasama Puslitbang Perikanan, Deptan Jakarta dan University of Bath, London, UK. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Nasution, Z. dan E. Dharyati. 1999. *Dampak Lelang Perairan Terhadap Ekonomi Nelayan di Sungai Lempuing, Sumatera Selatan*. *Pros. Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan*. Sekolah Tinggi Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Novita, E. et. al. 2007. *Integrasi Pembangunan dan Lingkungan*. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sitorus, M.T. F. 2004. Kerangka dan Metode Kajian Agraria. *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 9 (1) hal. 111-124.
- Soetarto, E. 2006. *Elite versus Rakyat: Dialog Kritis Dalam Keputusan Politik di Desa*. Laperapustaka Utama. Yogyakarta.
- Sriwijaya Post. 2002. *Permintaan Warga Rawangkalong Sulit Dikabulkan*. *Sriwijaya Post Online Sabtu*, 30 November 2002. Kayu Agung. Diakses tanggal 2 Februari 2007.
- Welcomme, R. L. 1979. *Fisheries ecology of floodplain rivers*. Longman Group Limited. London.
- Wiradi, G. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Insist Press. KPA & Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Woodhouse, E. J. 1972. *Re-Visioning the Future of the Third World: An Ecological Perspective on Development*. *World Politics*. 25 (1); Oct., 1972, 1-33. John Hopkin University Press. Baltimore, Maryland.
- Zain, I.H. 1982. *Status perikanan perairan umum di Sumatera Selatan*. *Pros. Puslibangkan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.